

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH
DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM
MENANGGULAGI ABRASI PANTAI DI DESA BONTOMARANNU
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR**

MUSLIM D. IMBA

Nomor Stambuk: 10564 01400 11



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Abrasi Pantai di Desa Bontomarranu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

Nama Mahasiswa : Muslim D. Imba

Nomor Stambuk : 10564 01400 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Pembimbing II

Drs. H. Ansvari Mone, M.Pd.

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Unismuh Makassar

Dr. H. Iryani Malik, Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1219/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada tanggal 1 Oktober 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



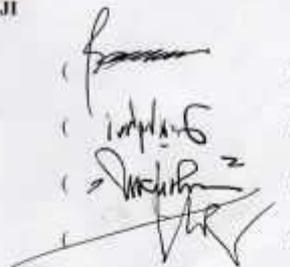
Dr. Hj. Ihyani Malik, Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENGUJI

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, Sos, Msi
3. Dra. Hj. Musliha Karim, M.si
4. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama mahasiswa . : Muslim D. Imba

Nomor stambuk : 105640140011

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar 2018

Yang menyatakan,



MUSLIM D. IMBA

ABSTRAK

Muslim D Imba. 2016. Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Abrasi Pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. (dibimbing oleh Lukman Hakim dan Ansyari Mone).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui. 1) Upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. 2) Faktor yang paling berpengaruh dalam menanggulangi abrasi Pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar?

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan termasuk dalam tipe penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Dalam penelitian menggunakan pemilihan informan secara sengaja (penpositive), jumlah informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskripsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa: 1) Upaya yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar adalah melakukan kegiatan pembangunan penahan atau turap dan pemecah gelombang di beberapa titik yang terlalu parah terkena abrasi seperti di Desa Bontomarannu yang memiliki kawasan pesisir. Selain itu upaya rehabilitasi secara alami juga berhasil dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat peduli lingkungan pesisir untuk ikut serta melakukan kegiatan mulai dari persemaian, pembibitan, dan penanaman di beberapa titik lokasi rehabilitasi kawasan mangrove. 2) Lemahnya koordinasi pada lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir membuat pembentukan Kelompok Kerjan Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Takalar tidak berjalan dengan lancar, hingga sampai saat ini pun upaya meningkatkan koordinasi antar sektor juga belum bisa dicapai. Selain itu juga belum ada bentuk kongkrit dari pemerintah untuk membuat Perangkat Hukum seperti Peraturan Daerah yang mengatur upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai Desa Bontomarannu Kabupaten Takalar.

Kata kunci: Abrasi, Peran Pemerintah

KATA PENGANTAR



Tak ada kata ataupun kalimat yang pantas terucap selain ungkapan syukur Alhamdulillah Robbil Alamin, penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan penulisannya, meskipun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun teknik penulisannya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada para pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Dr. H. Lukman Hakim, M.Si. sebagai pembimbing I dan pembimbing II Dr. H. Ansyari Mone, M.Pd, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. DR. H. Rahman Rahim, SE., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dekan Fakultas Fisipol Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si yang telah membina jurusan Ilmu Pemerintahan.

4. Dosen Ilmu Pemerintahan, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Kepada keluargaku yang tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar penulis tak pernah berputus asa dalam menghadapi kemelut hidup dan selalu mengingatkan agar senantiasa berdoa kepada sang pencipta.
6. Terima kasih teman-teman sekelas dan sahabat-sahabatku yang tak dapat kusebutkan satu persatu.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Rabbil Alamin. Amin

Makassar, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Abrasi Pantai	10
B. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana	15
C. Manajemen Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana.....	20
D. Menanggulangi dan Mencegah Bencana	34
E. Kerangka Pikir	36
F. Fokus Penelitian.....	37
G. Deskripsi Fokus Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian.....	40
C. Sumber Data	40
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Keabsahan Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Atau Karakteristik Objek Penelitian.....	46
B. Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Abrasi Pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar	54
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai kurang lebih 17.500 buah. Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km². Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada yang mencapai lebih kurang 81.000 km.

Penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia, yaitu lebih kurang 255 juta jiwa pada tahun 2015. Dan, lebih kurang 60 persen diantaranya hidup dan bermukim di sekitar wilayah pesisir. Sebagian besar diantaranya menggantungkan hidup kepada keberadaan sumberdaya alam pesisir dan lautan. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian besar kegiatan dan aktivitas sehari-harinya selalu berkaitan dengan keberadaan sumberdaya di sekitarnya.

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir dan menggantungkan hidup kepada keberadaan sumberdaya alam pesisir dan lautan, daerah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah

laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. (Soegiarto 1976: 25), sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Ancaman masyarakat yang bermukim di sekitar lingkungan pesisir pantai beragam salah satu diantaranya adalah adanya abrasi pantai, abrasi pantai adalah proses dimana terjadi pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi atau kata lain biasa disebut sebagai erosi pantai. Kerusakan garis pantai tersebut dikarenakan terganggunya keseimbangan alam di daerah pantai tersebut. Dan meski Abrasi dapat disebabkan oleh gejala alami tapi manusialah yang dijadikan sebagai penyebab utama terjadinya abrasi. Abrasi ini dapat terjadi kerana beberapa faktor antara lain, faktor alam, dan faktor manusia.

Beberepa faktor alam yang dapat menyebabkan abrasi antara lain, angin yang bertiup di atas lautan sehingga menimbulkan gelombang serta arus laut yang mempunyai kekuatan untuk mengikis sutau daerah pantai serta mencairnya es di wilayah kutub sebelah utara bumi.(

perkapalan.blogspot.com/2013/07/sedikit-tentang-abrasi.html). Dampak yang diakibatkan oleh abrasi pantai ini sangat besar. Garis pantai akan semakin menyempit dan apabila tidak diatasi lama kelamaan daerah-daerah yang permukaannya rendah akan tenggelam. Pantai yang indah dan menjadi tujuan wisata menjadi rusak. Pemukiman warga dan tambak tergerus hingga menjadi laut. Tidak sedikit warga di pesisir pantai yang telah direlokasi gara-gara abrasi pantai ini. Abrasi pantai juga berpotensi menenggelamkan beberapa pulau kecil di perairan Indonesia.

Abrasi pantai di Indonesia, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Sedikitnya 40% dari 81.000 km pantai di Indonesia, rusak akibat abrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, garis pantai di beberapa daerah Indonesia mengalami penyempitan yang cukup memprihatinkan. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter pertahun tentunya kondisi ini sangat memprihatinkan.

Kondisi kawasan pantai diberbagai lokasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan yang diakibatkan oleh adanya kejadian abrasi. Sekitar 100 lokasi di 17 Provinsi dengan panjang pantai kurang lebih 400 Km telah mengalami erosi pantai yang mengkhawatirkan. (Disposaptono, 2015). Jumlah catatan kejadian bencana abrasi di Indonesia mulai dari 1815 sampai dengan 2013 adalah sebanyak 192 kali.

Daerah yang memiliki ancaman abrasi pantai yaitu Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana pada daerah pesisir Desa Bontomarannu yang

berdomisili disekitar pantai berprofesi sebagai nelayan, jika ancaman abrasi pantai ini tidak segera ditanggulangi maka akan berdampak buruk terhadap mata pencaharian para nelayan dikarenakan desa ini sangat rentan terhadap abrasi pantai.

Setiap pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dengan skala tertentu. Pemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu lingkungan dan berlanjut dengan terjadinya kerusakan ekosistem wilayah pesisir yang bersangkutan (Khakim, 2003).

Kerusakan yang ditimbulkan adalah abrasi. Abrasi adalah suatu perubahan bentuk pantai atau erosi pantai yang disebabkan ketidakseimbangan interaksi dinamis pantai, baik akibat faktor alam maupaun non alam (campuran manusia). Abrasi dapat menimbulkan kerugian besar dengan rusaknya wilayah pantai dan pesisir dengan segala kehidupan yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang terjadi di Desa Bontomarannu, akibat kegiatan masyarakat yang kurang memperhatikan kondisi pantai, pemukiman nelayan yang terlalu dekat dengan garis pantai, berada pada sepanjang pantai. Pada saat musim gelombang perumahan ini terancam erosi, fasilitas umum, jalan utama dan pertokoan berada sangat dekat dengan garis pantai, yang rawan terhadap ancaman gelombang (erosi maupun limpasan), dan penghilangan perlindungan alami pantai serta pencemaran lingkungan perairan pantai oleh limbah dan sebagainya.

Akibatnya jika abrasi pantai terus dibiarkan akan membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan bagi penduduk yang bermukim di area selitar pantai. Diantaranya yaitu terjadinya penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai, kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai, karena terpaan ombak yang didorong angin kencang begitu besar, kehilangan tempat berkumpulnya ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau, dan lama kelamaan jika dibiarkan dapat merusak berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan serta bangunan yang ada disekitar garis pantai yang terjadi abrasi, bahkan kritisnya dapat menggelamkan sebuah pulau.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbunyi “ Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sector, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 4 ayat 3 tentang pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan “memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan”.

Masyarakat Desa Bontomarannu dan pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah desa Bontomarannu, pemerintah Kecamatan Galesong Selatan,

serta pemerintah Kabupaten Takalar wajib membuat regulasi dan realisasi yang nyata dalam rangka menanggulangi abrasi pantai di Desa bontomarannu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang no 23 tahun 1997 Bab III pasal 5 tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu diungkapkan dalam Edward III dalam Dwiyanto Indiahono (2009:31) bahwa dalam membuat regulasi dan mewujudkan regulasi tersebut, maka dibutuhkan empat variabel yang harus ikut berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yakni diantaranya (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi. Sedangkan menurut Sunggono (2014:32) mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang dapat menghambat Implementasi Kebijakan, yaitu (1) Isi Kebijakan dan (2) Sosialisasi.

Pasal lain yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup yaitu Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan

perusakan” dan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”, serta pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. (https://id.wikipedia.org/wiki/pengelolaan_lingkungan_hidup_di_Indonesia)

Uraian tentang kandungan Undang-Undang No 23 tahun 1997 diatas terlihat jelas bahwa untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup termasuk di dalamnya wilayah pesisir pantai dengan ancaman abrasi pantai, maka sudah seharusnya pemerintah menggandeng masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik secara fisik maupun mental.

Guna melihat lebih jauh kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, maka perlu kiranya dilakukan sebuah penelitian ilmiah yang berjudul “*Upaya Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.*”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar ?
2. Apa faktor yang paling berpengaruh dalam menanggulangi abrasi Pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam menanggulangi abrasi Pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah dalam penanggulangan abrasi pantai.

2. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peran pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan abrasi pantai.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan terhadap pemerintah-pemerintah lain dalam rangka menanggulangi abrasi pantai khususnya daerah-daerah yang terletak dipesisir pantai dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Abrasi Pantai

1. Abrasi dan Perubahan Iklim

a. Abrasi

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. (Undang-Undang No. 27 Tahun 2007).

b. Perubahan Iklim

Perubahan Iklim Global (global climate change) dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem mangrove. Perubahan iklim global terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi CO₂ dan gas rumah kaca. Molekul gas rumah kaca menyerap radiasi inframerah dan menghambat pemantulannya ke luar sistem planet bumi sehingga radiasi tersebut kembali ke planet bumi. Peningkatan konsentrasi inframerah di sistem planet bumi akan menyebabkan peningkatan suhu bumi (Matthew. 2010:4).

Dampak dari pemanasan global adalah mencairnya es yang ada di kutub, sehingga permukaan laut naik, curah hujan berubah, salinitas menurun, dan sedimentasi meningkat di wilayah pesisir dan lautan. Ada beberapa

skenario yang diperkirakan dapat terjadi dengan naiknya permukaan laut, yaitu: (1) meningkatnya erosi pantai; (2) banjir di wilayah pesisir yang lebih buruk; (3) terbenamnya wilayah lahan basah pesisir; (4) perubahan rentang pasang surut (tidal range) di sungai dan teluk; (5) perubahan lokasi penumpukan sedimentasi dari sungai (Ghufron. 2012:134).

2. Mitigasi Perubahan Iklim

Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Umumnya Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Ghufron. 2012:134).

Pantai merupakan batas wilayah daratan dengan wilayah lautan. Dimana daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Sedangkan daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya (Opa 2011:3).

Istilah pantai yang diungkapkan menurut Triatmojo yang harus diketahui diantaranya a) daerah pantai atau pesisir adalah suatu daratan beserta perairannya dimana pada daerah tersebut masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun aktivitas marine, b) pantai adalah daerah tepi perairan sebatas antara surut terendah dan pasang tertinggi., c) garis pantai adalah garis batas

pertemuan antara daratan dan lautan, d) daratan pantai adalah daerah ditepi laut yang masih dipengaruhi oleh aktivitas marine, e) perairan pantai adalah perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, dan f) sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. (Opa 2011:4).

3. Penyebab Terjadinya Abrasi Pantai

Secara umum, abrasi dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya abrasi dapat terjadi karena:

a. Faktor manusia

- 1) Peningkatan permukaan air laut yang diakibatkan oleh mencairnya es di daerah kutub sebagai akibat pemanasan global.
- 2) Hilangnya *vegetasi mangrove* (hutan bakau) di pesisir pantai. Sebagaimana diketahui, mangrove yang ditanam di pinggiran pantai, akar-akarnya mampu menahan ombak sehingga menghambat terjadinya pengikisan pantai. Sayangnya hutan bakau ini banyak yang telah dirusak oleh manusia.
- 3) Ketidakseimbangan ekosistem laut misalnya terjadi akibat eksploitasi besar-besaran manusia terhadap kekayaan laut mulai dari ikan, terumbu karang dan lain sebagainya.
- 4) Penambangan pasir di daerah pesisir yang berlebihan dan tidak terkontrol.

b. Faktor alam

- 1) Angin yang bertiup di atas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut sehingga mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai.

- 2) Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah atau batuan yang lama kelamaan akan terlepas dari daratan.
- 3) Bencana alam seperti tsunami.

4. Dampak dari Abrasi Pantai

Abrasi pantai adalah sebuah fenomena alam yang bisa dikategorikan sebagai sebuah bencana alam yang mengandung ancaman yang serius bagi lingkungan makhluk hidup terutama manusia, sebenarnya dampak dari abrasi pantai sangat kompleksitas bagi kehidupan manusia baik dari segi tempat tinggal, segi sosial, segi perekonomian, maupun dari segi budaya dalam skala lokal dan nasional. Adapun penjelasan lebih jauh tentang dampak abrasi pantai adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan area pantai. Penyusutan area pantai merupakan dampak yang paling jelas dari abrasi. Gelombang dan arus laut yang biasanya membantu jalur berangkat dan pulang nelayan ataupun memberi pemandangan dan suasana indah di pinggir pantai kemudian menjadi mengerikan. Hantaman-hantaman kerasnya pada daerah pantai dapat menggetarkan bebatuan dan tanah sehingga keduanya perlahan akan berpisah dari wilayah daratan dan menjadi bagian yang digenangi air. Ini tidak hanya merugikan sektor pariwisata, akan tetapi juga secara langsung mengancam keberlangsungan hidup penduduk di sekitar pantai yang memiliki rumah atau ruang usaha.
- b. Rusaknya hutan bakau. Penanaman hutan bakau yang sejatinya ditujukan untuk menangkal dan mengurangi resiko abrasi pantai juga berpotensi gagal total jika abrasi pantai sudah tidak bisa dikendalikan. Ini umumnya terjadi

ketika ‘musim’ badai, ketika keseimbangan ekosistem sudah benar-benar rusak ataupun saat laut sudah kehilangan sebagian besar dari persediaan pasirnya. Jika dampak yang satu ini terjadi, maka penanganan yang lebih intensif harus dilakukan sebab dalam sebagian besar kasus, keberadaan hutan bakau masih cukup efektif untuk mengurangi kemungkinan abrasi pantai. Ketiga, hilangnya tempat berkumpul ikan perairan pantai. Ini merupakan konsekuensi logis yang terjadi dengan terkikisnya daerah pantai yang diawali gelombang dan arus laut yang destruktif. Ketika kehilangan habitatnya, ikan-ikan pantai akan kebingungan mencari tempat berkumpul sebab mereka tidak bisa mendiami habitat ikan-ikan laut karena ancaman predator ataupun suhu yang tidak sesuai dan gelombang air laut yang terlalu besar. Akibat terburuknya adalah kematian ikan-ikan pantai tersebut.

c. Dampak abrasi di atas cukup menunjukkan bahwa abrasi sangatlah mengancam dan jika dibiarkan, daya destruktifnya dapat semakin merusak dan merugikan banyak pihak. Selain pada pemukim dan pebisnis di wilayah pantai, abrasi yang dibiarkan juga dapat berpengaruh besar terhadap hasil laut serta jenis jenis sumber daya alam yang menjadi bahan konsumsi pokok masyarakat sekaligus mata pencaharian sebagian masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Karena itulah, berbagai hal telah dilakukan dan atau dicanangkan untuk mencegah dan mengurangi abrasi pantai.

5. Cara Menanggulangi Abrasi Pantai

Ulah manusia, abrasi juga dapat terjadi karena faktor alam, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akan tetapi ini bukan berarti bahwa abrasi

pantai tidak dapat dicegah atau ditanggulangi, ada beberapa cara untuk menanggulangi abrasi pantai sebagai berikut: (Warisno 2013: 24)

- a. Melestarikan hutan mangrove dan menanam pohon bakau di daerah pesisir, selain untuk mencegah terjadinya abrasi juga dapat: 1) menjaga, melestarikan dan memelihara ekosistem di sekitar pantai; 2) mengurangi dampak tsunami; 3) menjaga kualitas air laut; dan 4) sumber oksigen terhadap makhluk hidup.
- b. Membangun alat pemecah gelombang ombak, tembok laut, *reventment* secara bertahap untuk meminimalisir erosi pantai (abrasi).

B. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana

1. Konsep Pemerintah

Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. (Rasyid 2011: 2).

Lahirnya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan

setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. (Rasyid 2011: 13).

Osborne dan Geabler yang dikutip (Rasyid 2011: 19), menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya karena itulah tugas pemerintah adalah untuk mencari cara untuk menyenangkan warganya. Demikian dengan lahirnya pemerintahan dapat memberikan pemahaman terhadap kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje yang dikutip (Safie 2007: 13) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu yang mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu:

Pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan. Kedua, bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat dan permasalahan psikologi sosial.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Kaufman (Thoha 1995: 101) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan

kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Rasyid (2011: 13) mengemukakan bahwa secara umum tugas-tugas pokok pemerintah yaitu:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
- e. Melakukan upaya-upaya yang meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

Ndraha yang dikutip (Safiie 2007: 16), fungsi pemerintahan terdapat ada 2 (dua) macam fungsi, yaitu pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik

diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar.

Mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah lainnya (Kecamatan, Kelurahan, dan Desa) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah (PEMDA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Gubernur, Walikota, Bupati dan perangkat daerah.

3. Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik, Ghufron (2012:45). Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana alam. Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari sebuah perspektif pemerintah lokal (pemerintah daerah). Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah daerah sebagai level pertama tahap bencana.

Respon merupakan hal yang penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal. Fokus pemerintahan lokal, masalah manajemen bencana difokuskan pada

pemerintah lokal, ada beberapa alasan yaitu: a) Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah lokal, b) Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana, c) Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan d) Kebijakan respons bencana memerlukan tempat secara lokal. Alasan-alasan tersebut mendasari manajemen bencana di wilayah lokal merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen bencana. Koesnadi (2015:85).

4. Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Penanganan bencana peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian, keterlibatan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup sekitar sebagai upaya mendasar dalam mencegah terjadinya berbagai macam bencana alam.

C. Manajemen Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana

1. Pengertian Manajemen

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena itu dalam menjalankan suatu organisasi, segala macam aktifitas yang telah direncanakan sangat berkepentingan sekali dengan manajemen, dan manajemen sangat erat sekali kaitannya dengan kepemimpinan, peranan

antar pribadi, pemberi informasi dan pengambilan keputusan sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Alat pencapai tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak dalam tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. menurut Salih bahwa manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Salih (1989: 9). Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa manajemen itu merupakan suatu kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain, diarahkan atau dikelompokkan kepada sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu, baik berupa sumber daya manusia atau sumber daya lainnya melalui tindakan-tindakan berantai dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan tujuan itu dapat dicapai dengan cepat, tepat serta sesuai dengan rencana. pengertian manajemen menurut, Melayu S.P. Hasibuan (1995:3) adalah *Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being ang other resources.* Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”. Berdasarkan penjelasan diatas, manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. G.R. Terry (Salam, 2004: 11), *Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives*. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Berdasarkan pendapat diatas, dapat di katakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab itu sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu :

- a. *Planning* (perencanaan).
- b. *Organizing* (pengorganisasian).
- c. *Actuating* (Penggerakan).
- d. *Controlling* (Pengawasan). (Salam, 2004:14)

Berdasarkan pendapat diatas, fungsi manajemen tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. menurut, Dharma Setyawan Salam sebagai berikut : Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Salam, 2004:14). Hal ini sejalan dengan pendapatnya Melayu S.P. Hasibuan (1995:3) bahwa Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan diatas, perencanaan adalah usaha untuk

melakukan tindakan/pekerjaan dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan pada masa akan datang. Jenis-jenis rencana itu ialah:

- a. Kebijakan adalah pernyataan atau pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan.
- b. Anggaran adalah suatu ihtiar dari hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut dinyatakan dalam kesatuan uang.
- c. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian yang harus dilaksanakan. Salam (2004:15).

Bertolak ukur dari pendapat diatas, bahwa fungsi perencanaan ini mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi secara proposional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa keuntungan dalam perencanaan yaitu :

- a. Dengan adanya perencanaan tujuan jelas, obyektif dan rasional.
- b. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur dan ekonomis.
- c. Perencanaan akan meningkatkan pendayagunaan semua fasilitas yang dimiliki.
- d. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat.
- e. Perencanaan dapat memperkecil resiko.
- f. Perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian.
- g. Perencanaan merangsang prestasi kerja.

h. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap. Hasibuan (1995:111).

Keuntungan dalam perencanaan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam merumuskan sesuatu pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga hasil yang di inginkan sesuai dengan tujuan yang di rencanakan.

Ada beberapa syarat perencanaan yang baik adalah :

- a. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan.
- b. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta.
- c. Menetapkan beberapa alternatif.
- d. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana. Hasibuan (1995: 112).

Perencanaan yang dilaksanakan dengan baik, maka akan dihasilkan suatu rencana yang baik dengan memperhatikan syarat-syarat perencanaan yang berdasarkan kesepakatan bersama. Fungsi pengorganisasian/fungsi pembagian kerja berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengertian Pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan hal yang statis yang menggambarkan pola-pola, skema, bagan dan menunjukan garis-garis perintah serta hubungan-hubungan yang ada. Organisasi hanya merupakan alat, dan wadah tempat seorang pemimpin melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan Pengorganisasian dengan organisasi adalah hasil dari pengorganisasian yaitu apabila

organisasi baik, maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai. Organisasi ini terdiri dari dua bagian dasar yaitu :

- a. Bagian-bagian/departemen/devisi.
- b. Hubungan-hubungan, yakni hubungan antar manusia, antar departemen yang harus ditetapkan dengan jelas dan tegas. (Hasibuan, 1995: 121).

Penetapan hubungan-hubungan ini merupakan salah satu syarat tercapainya kerja sama (*Team work*) antara pegawai. Pengorganisasian menurut para ahli bahwa pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktifitas tersebut. Hasibuan (1995:123). Organisasi dan manajemen Pemerintah di pengaruhi oleh beberapa factor antara lain: factor kultur dan budaya dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pengaruh factor budaya kultur berupa nilai, norma dan sikap maupun ekspektasi para pegawai terhadap organisasi dan manajemen pemerintahan. Nawawi (2013: 15). Berdasarkan pendapat diatas, pengorganisasian adalah kelompok orang yang bekerja sama, dengan adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, serta adanya pendelegasian wewenang.

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari

penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan” Salam (2004:19). Berdasarkan pendapat di atas, maka fungsi pengorganisasian ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang. Pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit organisasi seperti pendelegasian wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, hubungan informasi vertikal dan horizontal, dalam suatu koordinasi yang efektif dan efisien. Ada beberapa tahap dalam proses pengorganisasian yaitu:

- a. Penentuan kegiatan adalah seorang pimpinan harus mengetahui dan merumuskan kegiatan yang diperlukan serta menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Pengelompokan kegiatan harus mengelompokkan kegiatan atas dasar tujuan yang sama, hal ini berdasarkan atas dasar proses atau peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan.
- c. Pendelegasian wewenang adalah seorang pemimpin harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada bawahan.(Salam, 2004:19).

Perencanaan dan pengorganisasian, tibalah saatnya untuk melaksanakan perencanaan dan pengorganisasian itu dengan menggerakkan seluruh sumberdaya yang telah direncanakan dan diorganisir untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tercapainya tujuan bukannya hanya

tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian yang baik melainkan juga tergantung kepada penggerakan dan pengawasan. penggerakan menurut Melayu S.P. Hasibuan (1995:176).yaitu: *Actuating is setting all members of the group toward to achieve the objective willingly and keeping with managerial planning and organizing efforts*. Penggerakan adalah membuat semua kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian.

Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Menurut Dharma Setyawan Salam(2004: 20) yaitu Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Berdasarkan pendapat diatas, maka fungsi penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan dan mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.

Beberapa faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pergerakan yaitu:

- a. Motivasi adalah suatu keahlian seorang pemimpin dalam mengarahkan bawahannya agar tercapainya organisasi
- b. Kepemimpinan adalah merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang di inginkan.
- c. Sikap dan moral seorang pimpinan dalam membina kerja sama, harus mampu memahami perilaku bawahannya.
- d. Komunikasi adalah informasi, pesan yang dikomunikasikan dapat dimengerti dan ditafsirkan sama oleh orang lain. Salam (2004:21).

Tahap terakhir adalah pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena :

- a. Fungsi pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan.
- b. Pengawasan hanya dapat dilakukan, jika ada perencanaan/rencana.
- c. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan secara baik.

Tujuan baru diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan dan pengukuran dilakukan. Hasibuan (1995: 222). Berdasarkan

penjelasan tersebut, maka pengawasan sangat menentukan baik/buruknya pelaksanaan suatu rencana. Menurut Hasibuan (1995: 223) adalah Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Berdasarkan pendapat diatas, pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan supaya tujuan yang di hasilkan sesuai yang direncanakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Salam yaitu pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan panduan. Salam (2004:21). Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Jika terdapat tindakan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan maka diperlukan tindakan korektif/perbaikan sesuai dengan langkah, prosedur, dan ukurannya yang telah ditetapkan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan,

penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan di masa yang akan datang. Beberapa proses pengawasan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan standar atau dasar kontrol agar pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.
- b. Ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar penyimpangan dan kesalahan dalam melakukan kegiatan dapat dicegah serta diperbaiki.

Salam (2004:21).

Adanya pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen efektif dan efisien. Efektivitas artinya berhasil guna, sedangkan efisien artinya berdaya guna. Menurut, Emerson memberikan definisi sebagai berikut :

- a. *Effectiveness is measuring in term of attaining precibed goal or objektives.* Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. *The ratio of input to output, benefit to cost performance to the use of resources, as that which maximizes result which limited resources, in orther words, it was the relation between what is accomplished and what migh be accompliched.*

Efisien adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan hasil (*output*), antar keuntungan dengan biaya antara hasil pelaksanaan

dengan sumber-sumber yang dipergunakan, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan, Emerson (1995:223).

Efektifitas suatu pengukuran untuk tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan efisiensi perbandingan yang terbaik antar *input* dan *output*, dengan kata lain hubungan apa yang harus telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.

3. Pengertian Pemerintahan

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, dan pihak swasta dengan individu. Untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Pengertian pemerintah memiliki banyak arti. Sebagian ahli memberikan pengertian pemerintah dalam arti luas, yaitu pemerintah berdasarkan apa tugas yang dilaksanakannya. Menurut Inu Kencana Syafi'ie, di dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* bahwa secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “pe-” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
- b. Mendapat akhiran “an-“menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Syafie (2003 : 3).

Berdasarkan pendapat tersebut, kata dasar pemerintahan adalah perintah, memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. sehingga antara pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal. Pemerintahan menurut Dharma Setyawan Salam dalam bukunya, *Manajemen Pemerintahan Indonesia* adalah sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan” Salam, (2004:34). Berdasarkan pendapat diatas, serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan negara. dalam arti luas, pemerintahan adalah segala kegiatan dan fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam mencapai tujuan negara. menurut, Utrech yang dikutip oleh Dharma Satyawan Salam adalah :

Pemerintahan adalah gabungan dari semua kenegaraan yang berkuasa memerintah (arti luas) yaitu semua badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan. (Salam, 2004:36). Karena itu pemerintahan berarti berupaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berupa penerapan kewenangan dalam bentuk penataan, pengaturan, pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat, penduduk dan seluruh rakyat dalam segala kehidupan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik.

D. Menanggulangi dan Mencegah Bencana

Kerusakan lingkungan semakin hari semakin terlihat begitu jelas. Perlu kita memikirkan upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki lingkungan kita agar terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan. Langkah awal melakukan perbaikan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita baru di lingkungan nasional. Menurut Nurjanna (2010: 56), upaya-upaya penanggulangan bencana, yaitu:

1. Mitigasi. Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.
2. Menempatkan Korban di Suatu Tempat yang Aman. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang

Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu, menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai tanggungjawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”, seperti:

- a. Membentuk tim penanggulangan bencana.
- b. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
- c. Merelokasi korban secara bertahap.

Menurut Ramli (2010: 56), upaya-upaya pencegahan ancaman alam yaitu:

- a. Membuat pos peringatan bencana, salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak.
- b. Membiasakan hidup tertib dan disiplin. Perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal masyarakat menaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan masyarakat juga harus disiplin.
- c. Memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup, faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia tentang langkah pengurangan

bencana alam, yang diselenggarakan lebih dari dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang. Forum ini, pada masa itu merupakan forum terbesar tentang bencana alam yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 peserta hadir yang berasal dari 148 negara.

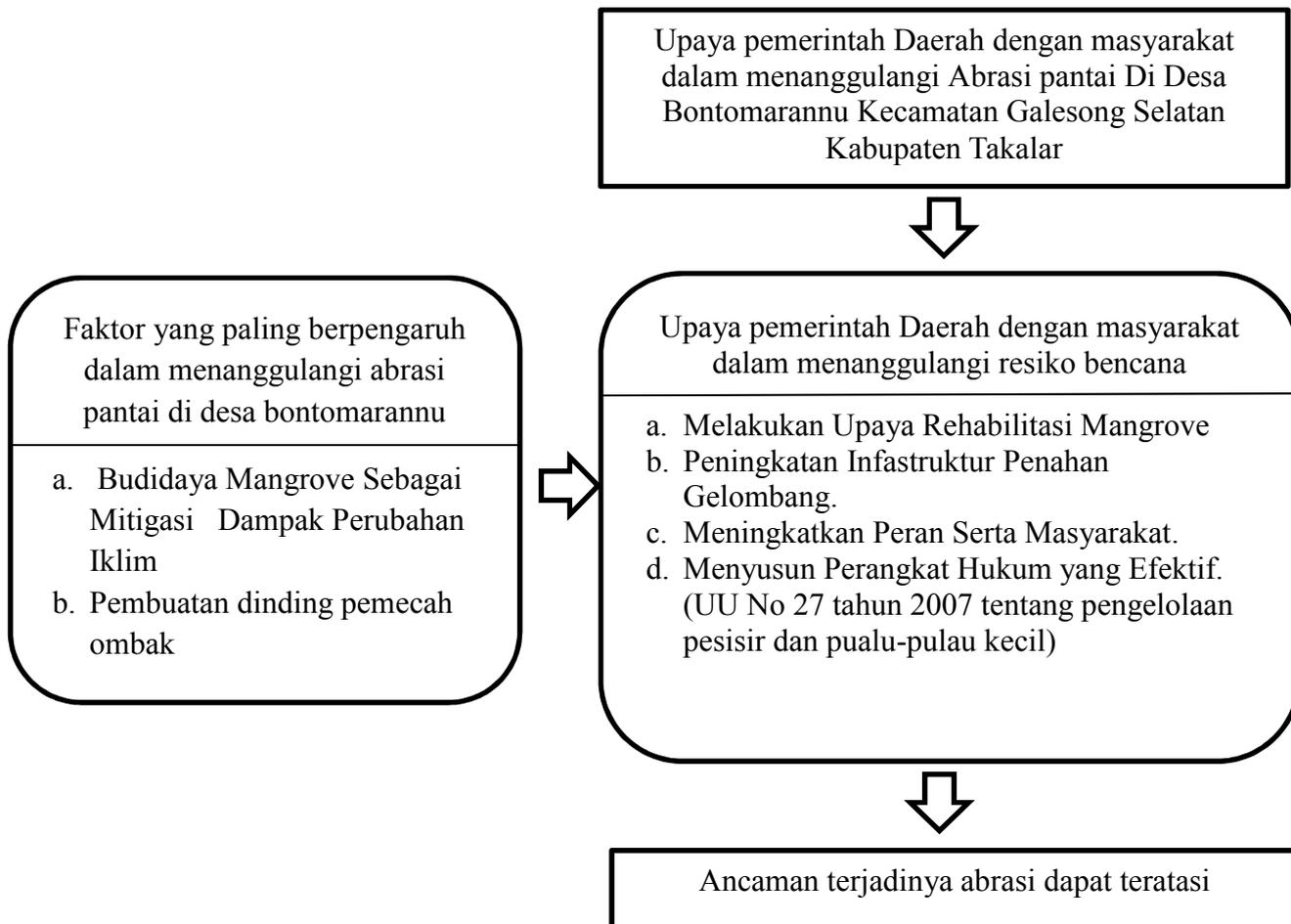
E. Kerangka Pikir

Menanggulangi bencana abrasi, pemerintah daerah terkait harus berupaya untuk meminimalisir terjadinya abrasi dengan kebijakan atau langkah realistik sesuai amanat Undang-Undang. Efektivitas suatu kebijakan pemerintah tidak akan berarti apabila pemerintah dan masyarakat tidak menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah sebagai pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi abrasi. Pemerintah harus melakukan hal-hal yang mengurangi terjadinya abrasi seperti, melestarikan hutan mangrove dan menanam pohon bakau di daerah pesisir dan membangun tanggul pemecah ombak serta masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan daerah pesisir.

Upaya pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam mengatasi terjadinya abrasi pantai di Desa Bontomarannu dapat dilakukan melalui mengupayakan tindakan rehabilitasi mangrove yang dapat berfungsi sebagai penahan gelombang pasang. Selanjutnya untuk melakukan upaya rehabilitasi mangrove maka selain pemerintah dibutuhkan pula peran serta masyarakat sebagai pelaku yang memanfaatkan pantai sebagai sumber pendapatan untuk ikut memelihara kondisi pantai.

Upaya-upaya yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan perangkat hukum, agar pantai dan upaya perlindungan dapat tetap terjaga. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada bagan kerangka pikir berikut.

Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam mengumpulkan data sehingga tidak terjadi kesalahan data yang diambil, untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya

ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konsep, adapun variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi abrasi pantai di desa Bontomarannu.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Melakukan upaya rehabilitasi mangrove dan peningkatan infastruktur penahan gelombang yaitu dengan a) melakukan upaya rehabilitasi mangrove baik secara alami dan b) melakukan upaya rehabilitasi mangrove baik secara buatan.
2. Meningkatkan infastruktur penahan gelombang, yaitu dengan diadakannya kegiatan program pelaksanaan pembangunan penahan gelombang seperti a) pembibitan, b) penanaman, dan c) pemeliharaan tanaman mangrove.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat yaitu dengan a) menjadi fasilitator yang akan merangkul dan memonitoring hasil kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal bagaimana mencegah terjadinya abrasi pantai dan b) menggali kearifan local daerah.
4. Menyusun perangkat hukum yang efektif sebagai upaya penanggulangan abrasi. Perangkat hukum tersebut bertujuan mengatur mekanisme pelaksanaan program yang harus dilakukan oleh pemerintah hingga keterlibatan kelompok kepentingan yang lain.
5. Budiaya mangrove merupakan upaya menanam dan memelihara pohon mangrove yang memiliki a) fungsi fisik dapat mencegah abrasi, b) menahan laju angin laut, dan c) dapat menahan gelombang pasang.

6. Pembuatan dinding pemecah gelombang merupakan pembuatan infrastruktur yang dapat menghalau terjadinya banjir dan sebagai pemecah gelombang sehingga erosi pantai dapat teratasi.
7. Ancaman terjadinya abrasi dapat teratasi dengan dilakukannya budidaya mangrove dan pembuatan dinding pemecah ombak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Januari hingga Februari di tahun 2017 satu bulan setelah ujian proposal. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif,
2. Tipe penelitiannya adalah tipe fenomenologi yakni tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara ilmiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci dengan analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah objek penelitian yang selanjutnya akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai

dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan objektif di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Data sekunder, adalah data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Target penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Bontomarannu dan pemerintah daerah setempat.

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Ilyas, S.Sos	IC	Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BKBD) Kabupaten Takalar.	1 orang
2.	Ridwan dg. Mile Aswandy	RM	Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar.	2 orang
3.	Maulana Dg.Muang	MY	Kepala Desa Bontomarannu.	1 orang
4.	Abd. Kadir	AK	Badan Permusyawaratan Desa Bontomarannu.	1 orang
5.	Rauf Maulana	RM	Sekretaris Desa	1 orang
6.	Dg. Nyao	DW	Tokoh Masyarakat.	1 orang
7.	Dahlia Wanti Dg.Limpo		Masyarakat Desa Bontomarannu.	2 orang
Jumlah Total Informan				9 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah :

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi atau telah pustaka yang dimaksud oleh peneliti yaitu cara pengumpulan data, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa foto, literatur, laporan tahunan, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman (Sugiono 2007: 49), keempat komponen tersebut yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun mekanisme pengumpulan data dilakukan dua kali.

Pertama, sebelum ke lapangan kemudian hasilnya dianalisis untuk keperluan penentuan fokus penelitian yang biasa disebut sebagai data hasil studi pendahuluan.

Kedua, pengumpulan data setelah setelah di lapangan. Banyaknya data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang dianggap penting.

3. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya menjadi dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu data yang telah disajikan dijadikan dasar untuk melahirkan kesimpulan awal. Kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan akan berubah jika pengumpulan data selanjutnya ditemukan informasi baru dan terverifikasi, maka kesimpulan sebelumnya dilakukan penyempurnaan.

G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik triangulasi.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber. Menurut Wiersma (Sugiono 2007: 273) data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber berikut.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Profil Desa Bontomarannu

Desa Bontomarannu merupakan salah satu desa yang terletak di bagian timur Kecamatan Galesong yang berjarak 10 Km dari Ibu Kota Kecamatan Galesong dan berjarak 14 Km dari Ibu Kota Kabupaten Takalar. Wilayah Desa Bontomarannu secara administrasi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga dan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar.

Pusat pemerintahan Desa Bontomarannu terletak di Dusun Balang. Desa Bontomarannu terdiri dari 4 dusun sebagai berikut:

- a. Dusun Balang
- b. Dusun Talisea
- c. Dusun Barua
- d. Dusun Mandi

Desa Bontomarannu merupakan salah satu desa yang berada 20 s/d 25 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 571,33 Ha.

2. Jumlah Penduduk/ Mata Pencaharian

Jumlah penduduk di Desa Bontomarannu yang terbagi ke dalam empat dusun berjumlah 2.027 jiwa, yakni:

Laki-laki : 1005 jiwa

Perempuan : 1021 jiwa

Secara umum keadaan penduduk Desa Bontomarannu berdasarkan mata pencaharian warga masyarakat, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang mata pencaharian. Hal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I: Mata pencaharian warga Desa Bontomarannu

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	10	0,77 %
2	TNI/POLRI	5	0,12 %
3	Pengusaha/Pemborong	56	1,35 %
4	Penjual/Pedagang/Nelayan	246	5,93 %
5	Pensiunan	4	0,10 %
6	Buruh	109	2,63 %
7	Petani	591	14,25 %
8	Karyawan	167	4,03 %
9	Sopir/Ojek	30	0,72 %
10	Lain-lain	809	70,10 %
Total		2.027	100

3. Struktur Pemerintahan

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh warga masyarakat yang masa kepemimpinannya selama 5 (lima) tahun sedangkan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dipilih oleh Kepala Desa setelah melalui musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para tokoh.

4. Kelembagaan Masyarakat

Lembaga yang ada di Desa Bontomarannu terbagi ke dalam kolom berikut disertai potensi dan masalahnya, yakni:

Bagan II: Lembaga di Desa Bontomarannu disertai potensi dan masalah yang dihadapi lembaga

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kantor tersendiri. 2. Kelengkapan Mobiler. 3. Perlu palatihan peningkatan SDM yang berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada BPD 2. Ada .anggota 3. Ada. masyarakat.
2	Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Kepala Desa yang belum maksimal. 2. Sarana di kantor desa belum lengkap. 3. Belum maksimalnya pelayanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada aparat desa. 2. Ada kaur-kaur. 3. Ada masyarakat.
3	Kelompok Tani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang memahami fungsi dan tugas KLP Tani. 2. Selalu mengharap bantuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak kelompok tani. 2. Ada sawah/kebun. 3. Ada bantuan bibit.
4	P3A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok-kelompok P3A kurang melaksanakan tugasnya dengan baik. 2. Saluran air tidak terurus dengan baik. 3. Gabah yang dipungut P3A dari petani tidak dimanfaatkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada P3A. 2. Ada saluran air. 3. Sawah luas. 4. Ada masyarakat tani.
5	Karang Taruna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak aktif lagi. 2. Tidak terurus dengan baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada karang taruna. 2. Banyak anak muda

		3. Kurang mendapat perhatian pihak terkait.	di Desa.
6	Majelis Ta'lim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang mendapat bimbingan di bidang agama. 2. Kurang mengadakan kegiatan. 3. Kurang latihan kesenian seperti qasidah. 4. Tidak ada pelatihan qasidah yang profesional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada majelis ta'lim. 2. Banyak ibu-ibu yang punya bakat bernyanyi lagu-lagu qasidah.
7	SPAS	Pemanfaatan dan fungsi SPAS kurang maksimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada gedung SPAS. 2. Ada tutor. 3. Ada penanggung jawab. 4. Banyak anak putus sekolah. 5. Banyak anak usia dini.
8	BKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak punya kantor sendiri. 2. Tidak lagi proaktif dalam tugas-tugasnya. 3. Tidak adanya kerjasama yang baik dalam tubuh organisasinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada BKM. 2. BKM punya modal usaha simpan pinjam
9	Pustu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang maksimal dalam melayani masyarakat. 2. Kurang tenaga medis yang ada di Pustu. 3. Kurangnya obat-obatan yang tersedia di Pustu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Pustu. 2. Banyak masyarakat butuh pelayanan. 3. Wabah penyakit.

		4. Kurangnya alat medis.	
10	Gapoktan	1. Kurangnya SDM anggota. 2. Tidak punya sekretariat. 3. Tidak punya kios saprodi.	1. Ada gapoktan. 2. Ada kelompok tani. 3. Ada modal bantuan.
11	KUD	1. KUD jauh dari desa. 2. KUD macet.	1. Ada KUD. 2. Masyarakat butuh kredit.
12	Puskesmas	1. Jauh dari desa. 2. Pelayanan kurang maksimal. 3. Sarana dan prasarana yang ada di puskesmas kurang lengkap. 4. Kekurangan tenaga medis.	1. Ada puskesmas. 2. Banyak siswa lulusan kesehatan yang menganggur. 3. Munculnya berbagai penyakit di tengah-tengah masyarakat.

Sumber: Dokumen Desa Bontomarannu

Desa Bontomarannu terbentuk sejak tahun 1991 yang awalnya disebut sebagai Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa, Panitra (sekdes), pernemen (kepala dusun), salea (ketua RT). Desa Bontomarannu mulai menerima anggaran Alokasi Dana Desa sejak ±5 tahun yang dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dana awal penerimaan ADD berjumlah 20 Juta, penerimaan kedua 60 juta, penerimaan ketiga 80 juta, penerimaan keempat 100 juta, dan sekarang menerima 120 juta.

Anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima dikelola secara bersama-sama oleh aparat pemerintah Desa Bontomarannu (Kepala Desa dan Aparat pembantu Desa Bontomarannu) dengan dukungan dan partisipasi masyarakat

dalam membangun Desa Bontomarannu. Adapun hasil dari pembangunan Desa berupa infrastruktur pemerintahan dan bangunan umum seperti Sekolah dan fasilitas umum seperti masjid dan balai perkumpulan lainnya. Adapun fasilitas lainnya yang terbangun yaitu rainase dan pengairan untuk masyarakat Desa Bontomarannu yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani serta profesi lainnya.

Strategi yang digunakan dalam pengelolaan ADD ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang partisipatif. Partisipatif artinya ada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan essensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi.

4. Potensi Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa merupakan salah satu sumber mata pencaharian yang sangat bernilai. Sumber daya alam yang ada berupa tanah subur yang kebanyakan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Luas tanah yang dimanfaatkan oleh warga Desa Bontomarannu berkisar 470,31 hektar.

Bagan III: Keadaan Sumber Daya Alam desa Bontomarannu

No	SDA	Luas
1	Tanah Pemukiman	125,25 Ha
2	Tanah Pertanian	235,00 Ha
3	Tanah Perkebunan	110,06 Ha
Jumlah		470,31 Ha

5. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling dibutuhkan untuk menjadikan desa jauh lebih berkembang. Untuk mengembangkan desa tentu warga perlu membutuhkan pendidikan yang layak. Tingkat pendidikan yang ditempuh warga Desa Bontomarannu berbeda-beda, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Bahkan masih ada juga warga yang belum atau tidak pernah bersekolah.

Bagan VI: Keadaan Sumber Daya Manusia desa Bontomarannu

No	Keterangan	Jumlah	Presentase Jumlah penduduk
1	Belum sekolah	119	7,17 %
2	Tidak sekolah	113	20,56 %
3	TK	35	0,78 %
4	SD	265	32,72 %
5	SLTP	43	25,09 %
6	SLTA	287	12,53 %
7	Perguruan Tinggi	41	1,14 %
Jumlah		903	

6. Sarana dan Prasarana

a. Transportasi

Akses transportasi Desa Bontomarannu sangat mudah dijangkau dengan berbagai jenis alat transportasi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Bagan V: Akses jalan transportasi di Desa Bontomarannu

No	Jenis Jalan	Volume	Lokasi
1	Jalan Propinsi	5.000 m x 8 m	Bontomarannu
2	Jalan Kabupaten	4.000 m x 6 m	Bontomarannu
3	Jalan Inspeksi Pengairan	3.500 m x 4 m	Bontomarannu
4	Jalan Desa	1.050 m x 4 m	Bontomarannu
5	Jalan Tani	1.000 m x 2 m	Bontomarannu

b. Kesehatan, sanitase dan air bersih

1) Puskesmas

Di Desa Bontomarannu terdapat 1 (satu) unit Puskesmas yang umumnya untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat yang ada di sekitar .

2) KIS dan BPJS

Dengan adanya program pemerintah tentang KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan BPJS pada pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi KK miskin dan sangat miskin dan sangat miskin semakin baik, bahkan dengan adanya program pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, tentang pelayanan kesehatan Gratis maka seluruh masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut akan mendapatkan pelayanan yang sama

dengan masyarakat miskin yang ada di kabupaten Takalar. Begitu pula untuk pelayanan BPJS baik mandiri maupun Ketenagakerjaan.

3) Sanitase

1) Jamban

2) Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

4) Sarana air bersih dengan mengandalkan sumur bor

c. Pendidikan

a. Taman Kanak-kanak = 2 unit

b. Sekolah Dasar = 2 unit

B. Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Abrasi Pantai di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

1. Melakukan upaya Rehabilitasi Mangrove

Fenomena masalah abrasi menyebabkan terjadinya fenomena sosial dan permasalahan dalam masyarakat seperti hilangnya lahan pertanian masyarakat, rusaknya infrastruktur bangunan yang ada digaris pantai bahkan kritisnya biasa menggelamkan sebuah pulau. Melihat kondisi yang terjadi demikian, maka pemerintah melakukan upaya rehabilitasi kawasan mangrove.

1.a. Melakukan upaya secara Alami

Upaya yang dilakukan secara alami yaitu dengan melakukan penanaman ekosistem mangrove dikawasan yang terkena abrasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian tanaman mangrove sebagai salah satu tanaman penahan gelombang yang alami. Kejelasan secara rinci lembaga pelaksana program harus benar-benar mengacu pada tugas pokok dan fungsi

suatu lembaga tersebut agar pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam melakukan upaya secara alami, ada beberapa lembaga yang memiliki peran dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi. Pertama, Dinas Perkebunan dan Kehutanan; Kedua, Badan Lingkungan Hidup; dan Ketiga, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar. Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan memiliki peran penting dalam hal rehabilitasi dan reboisasi hutan mangrove kawasan pesisir daerah.

Lembaga ini lebih dahulu melakukan upaya rehabilitasi dan reboisasi dikawasan pesisir. Untuk rentang waktu tahun 2010 hingga 2012, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Takalar belum bias melaksanakan upaya rehabilitasi dan reboisasi. Hal tersebut dikarenakan berbenturan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/ Menhut/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitas Hutan dan Lahan karena didalam isi peraturan tersebut mengamanatkan harus diawali dengan perencanaan. Isi dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut/2008 disebutkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan rehabilitasi harus mempunyai sistem perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Kepala Desa Bontomarannu menjelaskan bahwa:

“Upaya pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi di sekitaran pesisir di Desa Bontomarannu dilakukan guna menghindari terjadinya kembali abrasi dan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya” (Wawancara dengan MY 1 Januari 2017)

Adapun pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi di sekitaran pesisir di Desa Bontomarannu dilakukan berdasarkan pada aturan Peraturan Menteri Kehutanan yakni dengan merencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan

rehabilitasi. Setelah dilakukan rehabilitasi pada area yang terjadi abrasi dengan pemilihan bibit tanaman mangrove diharapkan akan mencegah terjadinya abrasi yang berkelanjutan.

Adapun saat ini setelah dilakukan peraturan menteri kehutanan, pemerintah pusat selanjutnya menetapkan bahwa pencegahan terjadinya abrasi sehingga Pemerintah Daerah diberikan waktu paling lama 5 tahun untuk menetapkan batas sempadan pantai atau menyesuaikan bagi yang penetapan batas sempadan pantainya belum sesuai dengan ketentuan Perpres.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 diharapkan akan memberikan jaminan terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung yang lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai serta ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain untuk kepentingan rekreasi, dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Senada dengan penjelasan di atas, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan rehabilitas mangrove bahwa:

“Awal mula perencanaan untuk rehabilitasi mangrove, kami menghadapi berbagai kendala seperti suplay bibit mangrove yang cukup sulit diperoleh, koordinasi pemerintah dengan masyarakat setempat yang belum terkoordinasi dengan baik”. (Wawancara dengan Sekretaris Desa RM 1 januari 2017)

Pelaksanaan rehabilitasi mangrove memang menemui kendala saat perencanaan, hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik pemerintah setempat dan masyarakat sekitar. Selanjutnya melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan abrasi sesuai Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari yaitu bersifat melakukan pembinaan terhadap masyarakat, pembinaan tersebut mulai dari proses pembibitan, proses penanaman, hingga proses pemeliharaan. Adapun pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penanaman yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup adalah pembibitan, penanaman, dan Pemeliharaan tanaman mangrove. Terkait dengan kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar, pelaksanaan penanaman mangrove dilakukan pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2010-2011 terjadi kevacuman sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang informan bahwa:

“Pembagian wewenang terkait kerjasama yang dilakukan dalam penanggulangan abrasi juga diperjelas, hal tersebut juga menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan. Karena hutan tanaman mangrove merupakan tempat biota hewan laut hidup dan berkembang”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat DW 1 januari 2017)

Adapun kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar dalam rangka kegiatan degradasi lingkungan pesisir, yakni salah satu fungsi dari manajemen pemeritahan adalah melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan dan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Program yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terjadi kevacuman pada tahun 2010, hal tersebut

dikarenakan beberapa masalah teknis sehingga proses pelaksanaannya harus ditunda.

1.b. Melakukan upaya secara Buatan

Secara alamiah sebenarnya pantai telah memiliki mekanisme perlindungannya sendiri, yaitu berupa kemiringan pantai dan bukit-bukit pasir yang terdapat di sepanjang pantai (CERC, SPM. Vol 1, 1984). Kemiringan pantai merupakan garis terluar pertahanan untuk meredam energi gelombang. meskipun tetap akan terjadi pengikisan pada pantai, tetapi seringkali bukit-bukit pasir tersebut akan dapat secara alamiah terbentuk kembali. Dengan demikian akan mampu melindungi tanah daratan yang ada di belakangnya. Pembentukan kembali bukit-bukit pasir tersebut terjadi dalam suatu periode kurun waktu tertentu. Dalam hal ini sedimen yang terkikis akan dapat digantikan oleh adanya endapan pada daerah tersebut. Hal ini biasanya disebut pantai yang stabil atau seimbang. Stabilitas pantai tergantung pada kecepatan debit sedimen yang terendapkan dan terpindahkan dari suatu kawasan pantai. Perpindahan sedimen terjadi karena interaksi gelombang, angin, arus, pasang-surut dan gaya lingkungan lainnya.

Seiring dengan perkembangan kemajuan peradapan manusia dimana terjadi perkembangan pembangunan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, maka seringkali kestabilan pantai terganggu oleh perilaku manusia tersebut. Pembangunan perumahan mewah, jalan, sarana pariwisata serta penambangan material yang sembarangan dan masih diperdebatkan dengan adanya penebangan tanaman pantai secara liar dan sebagainya

merupakan awal dari kerusakan pantai itu sendiri oleh tangan manusia. Akibatnya mekanisme keseimbangan erosi dan pengendapan pada pantai yang merupakan syarat terbentuknya pantai yang stabil akan terganggu pula. Pada saat sistem perlindungan pantai yang alami mulai terganggu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memakai metode quasi natural atau metode yang meniru perilaku alam, hal ini selanjutnya dijelaskan oleh salah seorang informan bahwa:

“Apabila sudah tidak dimungkinkan metode ini dimana erosi dan angkutan sedimen masih terjadi serta dapat merusak kondisi lingkungan kawasan pantai, maka selanjutnya diperlukan konstruksi buatan untuk melindungi kawasan pantai” (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat IC 1 januari 2017)

Penggunaan metode quasi natural atau metode yang meniru perilaku alam, misalnya dengan membuat bukit pasir tiruan yang berupa sand dune untuk mengatasi permasalahan diatas. Selama metode tersebut masih mampu mengatasi kondisi permasalahan maka akan tetap dipakai tanpa perlu menggunakan metode perlindungan pantai dalam bentuk lain. Langkah selanjutnya setelah dilakukan penggunaan metode quasi natural, maka selanjutnya dilakukan Perencanaan Dimensi Breakwater. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang informan bahwa:

“Pemecah gelombang tumpukan batu (*Rubble mount break water*) yaitu suatu struktur yang terdiri dari lapisan bawah (*bedding layer*) dan inti (*core*) yang terdiri batu pecah (*quarry stone*) yang ditutupi satu atau dua lebih lapisan batu yang lebih besar, bisa batu pecah atau cetakan beton (*concrete armor unit*). Ada beberapa pertimbangan penting dalam perencanaan breakwater” (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat RM 12 januari 2017)

Penggunaan pemecah gelombang tumpukan atau diharapkan dapat memecah gelombang obak dari dasar, sehingga saat gelombang menghantam

tembok pembatas, maka gelombang tidak akan mempengaruhi tembok bibir pantai. Dengan demikian maka resiko terjadinya abrasi dapat dicegah.

2. Peningkatan Infastruktur Penahan Gelombang

Upaya yang dilakukan secara buatan yaitu dengan melakukan pembangunan penahan gelombang atau turap dan pemecah gelombang. Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan lembaga yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsi membangun infastruktur pendukung penanggulangan abrasi. Adapun program pelaksanaan pembangunan penahan gelombang atau turap dan pemecah gelombang Dinas Pekerjaan Umum yaitu:

- a. Pembibitan
- b. Penanaman
- c. Pemeliharaan tanaman mangrove

Hal ini senada dengan penjelasan seorang anggota masyarakat bahwa:

“Dengan adanya pembangunan dinding pemecah gelombang dan penanaman hutan mangrove hal ini sangat berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat setempat di pesisir pantai, dengan adanya tanggul tersebut kemungkinan banjir rob dapat diminalisir” (Hasil wawancara dengan informan DL, 28 Mei 2018).

Kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman mangrove dilakukan dengan tujuan sebagai pencegah terjadinya abrasi selanjunya dimasa yang akan datang. sedangkan pembangunan pondasi dinding pemecah gelombang dengan tujuan kekuatan ombak sudah teredam begitu sampai di bibir pantai, sehingga abrasi dapat dicegah sebelumnya.

2.a. Pembibitan

Upaya demi mencegah abrasi yang terus mengancam kawasan pantai. Terminologi abrasi merujuk pada kondisi tergerusnya daratan (pantai) oleh gempuran ombak. Untuk mencegah abrasi terjadi maka akan dilakukan penanaman bakau yang dinilai akan lebih efektif mengatasi abrasi jika dibandingkan dengan penanganan secara fisik, seperti pembangunan groin atau bangunan pemecah gelombang. Kepala Desa menjelaskan bahwa:

“kepala desa menuturkan, bakau lebih efektif untuk mengikat pasir dan lumpur yang terbawa ombak. Dengan demikian, gempuran ombak tidak akan merusak daratan karena tertahan oleh mangrove” (Hasil wawancara dengan informan MY, 28 Mei 2018)

Keberadaan hutan bakau juga mampu memperbaiki habitat kawasan pantai, dengan habitat pantai yang baik, populasi ikan juga akan banyak sehingga hasil tangkapan meningkat. Selain itu, menanam bakau bisa dilakukan di sela-sela aktivitas bekerja sehari-hari. Selama ini propagul (bibit bakau) yang ditanam bisa diperoleh dari kawasan pantai, yaitu dari anakan pohon bakau yang sudah tua.

2.b. Penanaman

Masyarakat di kawasan pesisir pantai berupaya mengatasi dan mengurangi dampak abrasi. Untuk melindungi pantai dari kerusakan, masyarakat melakukan penanaman bakau. Sebagian masyarakat pesisir lainnya mengubah budidaya tanaman bakau disekitar tempat mereka mencari ikan. Mereka beramai-ramai menanam propagul yang didapat dengan mencari di

pinggir pantai. Seperti keterangan salah seorang warga desa mengatakan bahwa:

“setiap satu propagul yang ditanam masyarakat dihargai Rp 50. Saat itu, sedikitnya 50.000 bakau muda mampu ditanam di kawasan pantai. Bakau muda tersebut kini telah tumbuh tinggi dan terbukti mampu melindungi pantai” (Hasil wawancara dengan informan DW, 28 Mei 2018)

Menurut pantauan di kawasan Pantai, daratan yang dulu ditanami bakau hingga kini tetap bertahan. Sementara daratan yang dulu tidak ditanami bakau kini sudah berubah menjadi lahan tertelan laut. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Bontomarannu bahwa:

“Di Desa Bontomarannu, masyarakat terus berupaya mengolah kawasan pesisir yang rusak. Para petani di Desa Botomarannu memanfaatkan tambak yang terkena abrasi untuk budidaya tanaman bakau. (Hasil wawancara dengan informan MY, 28 Mei 2018)

Pemerintah Desa Bontomarannu, dalam setahun terakhir terjadi penambahan areal tambak rumput laut sekitar 400 hektar dimana tempat bakau dibudidayakan. Guna mencegah abrasi juga ditempuh warga pesisir pantai setempat membuat benteng mangrove. Gerakan membangun benteng mangrove yang dilakukan warga karena menyadari bakau memang tidak dapat menekan laju abrasi secara keseluruhan. Namun, setidaknya bisa meredam. Untuk melindungi agar tanaman bakau tidak dirusak atau dibabat lagi. Seperti keterangan salah seorang informan bahwa:

“Kelompok Tani di sekitar pantai membuat aturan tegas, setiap Anggota kelompok yang merusak satu batang bakau wajib menanam 200 batang bakau yang baru” (Hasil wawancara dengan informan DH, 28 Mei 2018)

Masyarakat yang tinggal di pantai kawasan pesisir adalah urat nadi kehidupan. Denyut napas mereka bisa dikatakan menyatu dengan deburan ombak. Di sini pula berlangsung aktivitas ekonomi yang melibatkan puluhan

warga. Sehingga membuat aturan tersebut dimana keberadaan hutan bakau juga mampu memperbaiki habitat kawasan pantai. Masyarakat meyakini, dengan habitat pantai yang baik, populasi ikan juga akan banyak sehingga hasil tangkapan meningkat.

2.c. Pemeliharaan Tanaman Mangrove

Penanaman tumbuhan pelindung pantai (bakau, nipah dan pohon api-api) dapat dilakukan terhadap pantai berlempung, karena pada pantai berlempung pohon bakau dan pohon api-api dapat tumbuh dengan baik tanpa perlu perawatan yang rumit. Pohon bakau dan pohon api-api dapat mengurangi energi gelombang yang mencapai pantai sehingga pantai terlindung dari serangan gelombang. Penanaman pohon bakau juga dapat mempercepat pertumbuhan pantai karena akar-akar pohon bakau akan menahan sedimen/lumpur yang terbawa arus sehingga akan terjadi pengendapan di sekitar pepohonan bakau. Pohon bakau juga dapat berfungsi sebagai tempat berlindung biota laut dan bagi ikan, sehingga dapat melestarikan kehidupan di sekitar pantai tersebut. Pohon bakau juga berfungsi sebagai penghasil oksigen dan sebagai penyeimbang untuk kelestarian lingkungan pantai (Triatmodjo, 1999). Berikut penjelasan Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa:

“Agar dapat berfungsi dengan efektif diperlukan banyak bibit pohon bakau dan diperlukan area yang sangat luas untuk pelestarian pohon bakau. Perawatan pada masa-masa awal penanaman bakau juga diperlukan, karena pohon bakau memerlukan waktu yang lama agar dapat berfungsi dengan baik sebagai penahan gelombang. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan terpadu mulai menanam, memelihara dan perawatan tanaman bakau” (Hasil wawancara dengan informan RM, 15 Mei 2018)

Penanaman kembali hutan mangrove seringkali gagal karena bibit mangrove yang baru di tanam belum memiliki akar yang kuat untuk menahan diri dari gelombang ombak yang besar. Hal ini senada dengan dengan penjelasan salah satu informan bahwa

“Penanaman mangrove kadang tidak berhasil dikarenakan bibit yang ada masih kecil sementara gelombang ombak yang besae” (Hasil wawancara dengan informan MY, 28 Mei 2018)

Dengan adanya breakwater di depan hutan mangrove, akan mengurangi tinggi gelombang datang sehingga tingkat kerusakan mangrove dapat di kurangi. Lokasi pekerjaan merupakan pantai berlumpur dengan beberapa sungai yang bermuara disekitarnya. Pasokan sedimen dari sungai-sungai tersebut merupakan media yang mendukung pertumbuhan hutan mangrove. Selain itu hutan mangrove merupakan sumber nutrisi yang sangat kaya bagi budidaya tambak dan tempat pembiakan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Keuntungan lain, hutan mangrove akan menangkap sedimen sehingga lambat laun akan menaikkan elevasi lahan dan membentuk lahan baru.

3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

Meningkatkan peran serta yaitu dengan menjadi fasilitator yang akan merangkul dan memonitoring hasil kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal bagaimana mencegah terjadinya abrasi pantai dan menggali kearifan local daerah.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi oleh pemerintah dilingkungan masyarakat, bisa di bilang masyarakat dapat mengerti tentang masalah dan

bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut” (Hasil Wawancara dengan informan DH, 2 Januari 2018)

Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan pesisir dan laut di wilayahnya sangat tergantung pada tingkat pemahaman masyarakat akan arti penting dari fungsi perlindungan itu sendiri. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat akan tumbuh rasa memiliki sehingga mau menjaga dan merawat konstruksi hybrid engineering yang berada di wilayahnya.

3.a. Fasilitator dalam mencegah terjadinya abrasi pantai

Pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan terkait rencana pelaksanaan kegiatan serta rencana berkelanjutan pengelolaan lahan dari hasil kegiatan hybrid engineering tersebut. Sementara itu, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara struktur hybrid engineering yang telah dibangun di wilayahnya, sehingga menjamin struktur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, masyarakat pula yang akan mengambil peran utama dalam pengelolaan lahan setelah kegiatan *hybrid engineering* sudah memberikan hasil berupa lahan yang terpulihkan.

Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi abrasi data dilakukan dengan menjaga kelesatrian laut. Seperti tetap menjaga terumbu karang yang ada didasar laut serta tidak menggali dan mengambil pasir didasar. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang informan bahwa:

“Adanya aktivitas manusia yang menggali dasar laut guna menggunakannya sebagai bahan bangunan, membuat dasar laut semakin dalam. Hal tersebut mengakibatkan kemungkinan terjadinya tsunami semakin

besar. Ditambah lagi adanya aktivitas pengeboman ikan didasar laut, secara tidak sadar menghancurkan karang di dasar yang berfungsi sebagai pemecah gelombang”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat IC 2 Januari 2017)

Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan pesisir dan laut di wilayahnya sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting dari fungsi perlindungan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat secara bertahap dan terus menerus. Tantangan atau pun kendala yang akan dihadapi dalam kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat Desa Bontomarannu tentang *hybrid engineering* antara lain pemahaman bahwa *hybrid engineering* tidak secara otomatis akan menyelesaikan masalah banjir gelombang pasang (rob) yang dihadapi oleh desa tersebut. Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa mekanisme *hybrid engineering* adalah sebuah proses yang bertahap dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, penjelasan bahwa diberikan oleh salah seorang informan yakni:

“Peran mangrove sebagai bagian akhir dari tahapan proses inilah yang akan memberikan fungsi perlindungan terakhir bagi masyarakat dan pesisir. Pemberian pemahaman yang tepat bagi masyarakat tentang arti penting dari *hybrid engineering* menjadi sangat vital”. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat AK 2 Januari 2017)

Dengan pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat akan tumbuh rasa memiliki sehingga mau menjaga dan merawat konstruksi *hybrid engineering* yang berada di wilayahnya. Selain itu, dengan melibatkan langsung masyarakat desa dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan *hybrid engineering*, seperti kegiatan pembangunan konstruksi, sosialisasi dan pelatihan, akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kesadaran

masyarakat akan nilai penting dari fungsi perlindungan pesisir berbasis mangrove.

Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman untuk tinggal di desa yang berada di pesisir dari ancaman erosi dan abrasi yang selalu mengintai, menjadi pemicu bagi setiap warga masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Desa Bontomarannu untuk terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan perlindungan pesisir di desanya. Semangat inilah yang perlu dijaga dan dituangkan melalui kesepakatan bersama masyarakat desa dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut desa secara baik dan berkelanjutan.

3.b. Menggali kearifan local daerah.

Pengelolaan wilayah berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat dimana masyarakat local ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (Sumartin 2011).

Arah kebijakan pemerintah di masa lalu yang lebih memprioritaskan pembangunan masyarakat perkotaan dan pembangunan pertanian pedalaman, menyebabkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan. Arah kebijakan saat ini seharusnya adalah memberikan perhatian yang sama pada masyarakat pesisir dengan cara memberdayakan masyarakat pesisir tentang pemahaman sadar lingkungan dengan menggugah kesadaran dan pola berpikir kritis tentang kondisi ekosistem yang ada disekitarnya.

Lingkungan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Masyarakat adalah organisasi kelompok manusia yang memiliki kebudayaan untuk

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Budaya dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan harus ditumbuhkan dalam setiap individu. Bukan hanya budaya sebagai fungsi mempertahankan diri, tetapi juga memperhatikan kembali bagaimana mampu menjaga kelestarian lingkungan yang baik. Seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa:

“Kearifan lokal masih menjadi salah satu potensi masyarakat Indonesia yang dapat dikembangkan kembali dalam konteks pelestarian lingkungan sebagai upaya memperbaiki lingkungan. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat RM 12 januari 2017)

Kearifan lokal ini sering kali terlupakan oleh institusi formal yang berupaya mentransformasikan pemahaman akan lingkungan kepada masyarakat. Padahal pada masyarakat sendiri mempunyai skema dalam memperoleh pemahaman atas sesuatu, termasuk pelestarian terhadap alam. Kebijakan yang ada selama ini, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Penjelasan berikutnya diberikan oleh salah satu informan bahwa:

“kurangnya perhatian untuk melibatkan sehingga berdampak pada tidak adanya rasa memiliki serta pemahaman tentang kegunaan dan pelestarian hamper tidak ada sama sekali pada masyarakat setempat. Padahal apabila dilihat dari karakteristik masyarakat wilayah pesisir sangatlah kompleks dan beragam, sehingga dalam pengelolaan wilayah pesisir sudah seharusnya melibatkan masyarakat setempat” (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat DH 28 januari 2017)

Pengelolaan berbasis masyarakat atau sering disebut Community Based Management (CBM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai pengelolanya. Dengan melibatkan masyarakat lokal

secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring diharapkan masyarakat lebih peduli dan merasa memiliki terhadap lingkungan pantai.

3.c. Meningkatkan Jaringan Koordinasi Antar Sesama Pelaksana Program

Pentingnya penanggulangan bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan perwujudan dari amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengintegrasikan mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana dalam rangka membangun ketangguhan bangsa dan hasil hasil pembangunan yang aman dari ancaman bencana.

Senada dengan penjelasan sebelumnya, Sekretaris Desa RM mengungkapkan bahwa:

“Suatu upaya pembangunan harus menerapkan upaya Pengurangan Risiko bencana yang telah di Integrasikan. Sebagai upaya dalam keberhasilan integrasi pembangunan dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana, maka diperlukan koordinasi antar sector termasuk didalamnya Lembaga pemerintahan sebagai upaya untuk menciptakan koordinasi penanggulangan bencana”. (Wawancara dengan RM 2 januari 2017)

Permasalahan dalam mencegah dan menanggulangi abrasi pantai bukan hanya terletak pada pelaksanaa program pada masing-masing instansi yang terkait. Namun juga terletak pada jaringan koordinasi antar sesama pelaksana program yang memiliki misi yang sama, baik antara pemerintah

dengan masyarakat maupun antar lembaga pemerintah. Dijelaskan kembali oleh salah seorang masyarakat bahwa:

“Dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, Badan Lingkungan Hidup terlebih dahulu pendataan terhadap kelompok masyarakat yang peduli lingkungan pesisir. Sehingga sasaran dan tujuan pembinaan tersebut lebih tepat dan berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan DL, 28 Januari 2017)

Dengan memberikan pembinaan kepada Kelompok pengelola mangrove dalam hal bekal pembinaan yang meliputi persemaian, pembibitan, hingga proses penanaman bibit mangrove dilokasi pesisir baik di garis pantai maupun sempadan pantai. Bantuan alat-alat kelengkapan juga diberikan dalam menunjang motivasi kerja masyarakat peningkatan kepedulian terhadap ketersediaan dan kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) lingkungan pesisir. Melihat keadaan kondisi ekstrim abrasi yang ada sebagai ekosistem yang hidup dipesisir pantai sudah mulai memprihatinkan. Sehingga pada tahun 2006 pemerintah bekerjasama dan membentuk Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap semakin meningkatnya kerusakan ekosistem mangrove.

“Menyadari bahwa pengelolaan ekosistem mangrove harus ditangani secara terpadu yang melibatkan empat instansi utama pengelolaan ekosistem mangrove, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup”. (Wawancara dengan anggota BPBD, RW 4 Februari 2017)

Hal ini merupakan upaya penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor/lembaga dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang peran mereka

dalam kegiatan melindungi ekosistem mangrove sangat penting dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

“Keikutsertaan masyarakat pesisir dalam mengelola dan menjaga kawasan pesisir memang dikatakan perlu ditingkatkan. Sebagian besar masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan mengambil kekayaan hasil laut seharusnya seimbang melakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan hutan mangrove agar habitat yang hidup dipesisir hutan mangrove terjaga kelestarian”. (Wawancara dengan MY 15 februari 2017)

Diharapkan dengan upaya ini, masyarakat akan berpartisipasi dalam program penanggulangan abrasi terkait pengendalian lingkungan pesisir baik secara perorangan/keluarga maupun secara kelompok yang lebih terorganisir. Evaluasi terus dilakukan baik dari pihak kelompok sendiri maupun dari Lembaga yang memberikan pembinaan agar hasil kerja dan kendala yang dilaksanakan dalam jangka waktu kedepan bisa dimonitoring agar kendala yang sama bisa cepat diatasi.

“Kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konservasi dilakukan dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok nelayan yang ada di tiap-tiap desa desa pesisir. Namun baru beberapa desa saja yang baru terealisasi kegiatannya. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan dalam tabel berikut ini: datang baik dari internal maupun eksternal kelompok”. (Wawancara dengan IC 20 februari 2017)

Pemerintah Desa Bontomarannu Dinas Perikanan dan Kelautan yang bertanggungjawab terhadap kelestarian sumber daya laut yang berada dipesisir menggunakan tugas dan fungsinya terhadap permasalahan degradasi lingkungan yang berujung pada terjadinya abrasi.

3.d. Kerjasama pemerintah dengan masyarakat maupun antar lembaga pemerintah sebagai upaya pencegahan terjadinya abrasi.

Kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Jadi perlu ada kerjasama antar elemen masyarakat, baik pemerintah, pihak

swasta, dan masyarakat sekitar. Penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung dengan mengedepankan prinsip keterpaduan. Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu dan didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Selama ini orang masih menganggap bahwa bencana yang bisa mengakibatkan kerugian besar adalah bencana seperti tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor. Sedangkan abrasi tidak dianggap sebagai bencana besar yang juga dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Sehingga bencana abrasi kurang begitu diperhitungkan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Padahal jika dilihat dampaknya dalam jangka panjang, maka abrasi juga bisa menimbulkan kerugian besar baik materiil maupun immaterial. Oleh karena itu perlu adanya paradigma baru dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana abrasi.

Melihat kondisi abrasi yang terjadi di kabupaten Jepara dan Demak, maka perlu adanya kerjasama antar elemen masyarakat baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kelompok masyarakat sebagai pelaku utama manajemen bencana ini harus dapat diupayakan dari tingkat yang paling kecil yaitu kelompok Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dusun, kampung, sampai kelompok yang lebih besar yaitu desa atau kelurahan, kecamatan, bahkan kota atau kabupaten. Begitu banyaknya permasalahan yang timbul kelompok masyarakat beserta tenaga pendamping yang ditugaskan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten melakukan musyawarah untuk

mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Berdasarkan laporan kelompok Rehabilitasi dan Konservasi lingkungan pesisir Kecamatan Kabupaten, solusi yang diberikan adalah:

- a. Melakukan penyulaman untuk memperbaiki bibit yang telah mati.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap bibit yang telah ditanam, kemudian melakukan sosialisasi kepada nelayan yang ingin melakukan penangkapan udang agar tidak mengoperasikan alat tangkap di wilayah konservasi.
- c. Penanaman ulang sesuai dengan pola tanam yang telah ditetapkan, adapun penanaman dilakukan menunggu kondisi angin mulai teduh.

Setelah kegiatan pemberdayaan ini selesai, dilakukan monitoring terhadap hasil di lapangan. Fungsi monitoring mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. Salah satu informan menjelaskan bahwa:

“keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring” (Wawancara dengan IC 20 februari 2017)

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring juga digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber- sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Tim KPD melaksanakan monitoring dengan mendatangi lokasi setelah 3 minggu dari proses penanaman. Dari hasil monitoring diketahui bahwa pohon mangrove masih hidup meskipun ada beberapa yang tumbang.

Tim tetap berusaha untuk selalu mengawasi dan memonitor perkembangan kegiatan pemberdayaan ini. Apakah abrasi bisa teratasi atau sebaliknya. Hal ini bisa menjadi catatan penting untuk perbaikan selanjutnya. Namun hasil dari semua kegiatan ini tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, mengingat proses pertumbuhan pohon mangrove membutuhkan waktu yang cukup lama.

4. Menyusun Perangkat Hukum yang Efektif

Perangkat hukum tersebut bertujuan mengatur mekanisme pelaksanaan program yang harus dilakukan oleh pemerintah hingga keterlibatan kelompok kepentingan yang lain. Salah satu langkah kongkrit yang harus dilakukan dalam penanggulangan abrasi yakni menyusun perangkat hukum yang efektif dalam mewujudkan upaya penanggulangan abrasi di Desa Bontomarannu Kabupaten Takalar. Perangkat hukum tersebut bertujuan mengatur mekanisme pelaksanaan program yang harus dilakukan oleh pemerintah hingga keterlibatan kelompok kepentingan yang lain.

“Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bontomarannu Kabupaten Takalar melalui menyusun perangkat hukum yang efektif dalam mewujudkan upaya penanggulangan abrasi sama sekali belum ada. Upaya yang dilakukan hanya berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah saja”. (Wawancara dengan MY 21 februari 2017)

Meskipun tidak memiliki perangkat hukum yang efektif dalam mewujudkan upaya penanggulangan abrasi di Desa Bontomarannu Kabupaten Takalar, namun penanggulangan abrasi merupakan salah satu dari beberapa isu dan/atau yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor

09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar tahun 2010-2015. Tetapi tidak memiliki fokus yang jelas. Karena di RPJMD tidak hanya pada permasalahan abrasi saja, namun permasalahan lain yang lebih urgent juga dibahas seperti kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, dan pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar tahun 2010-2015 merupakan komitmen politik dari Pimpinan daerah yang dalam hal ini Bupati Takalar berusaha melakukan apa yang menjadi janji politiknya pada saat kampanyenya. Namun untuk penanggulangan abrasi yang dilakukan dinilai tidak serius dan fokus dalam pelaksanaannya.

Senada dengan penjelasan sebelumnya, salah seorang informan menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam upaya penanganan abrasi sebenarnya telah diatur dalam UU pasal 14 yang mengungkapkan masalah pengendalian lingkungan hidup” (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat DW 23 februari 2017)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya tidak hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan masalah dan pendanaan kegiatan pembangunan. Pada pasal 14 di peraturan perundang undangan tersebut mengatakan bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan bahwa

penanggulangan abrasi pantai merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh salah seorang masyarakat yang mengungkapkan bahwa:

“Fenomena aneh yang terjadi pada kegiatan penanggulangan abrasi tersebut. Pembangunan penahan gelombang atau turap mengubah arah arus sehingga berpotensi daerah sekitar yang dilakukan penanggulangan ikut tergerus akibat perubahan arus gelombang”. (Wawancara dengan AK 24 februari 2017)

Kajian yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bahwa pembangunan penahan gelombang atau turap dipantai untuk menanggulangi abrasi bukan solusi yang efektif, karena harus memperhatikan dampak lain yang akan timbul seperti permasalahan kelestarian ekosistem mangrove. Segala bentuk keputusan yang dibuat harus dengan kajian yang matang, jika tidak maka persoalan- persoalan lingkungan bisa muncul akibat pembangunan pantai tersebut.

C. Faktor Yang paling Berpengaruh Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

1. Budidaya Mangrove Sebagai Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang sangat vital, baik bagi pesisir/ daratan maupun lautan. Selain memiliki fungsi ekologis, ekosistem mangrove memiliki fungsi fisik sebagai pencegah abrasi, menahan laju angin laut ke udara, intusi garam ke daratan serta penahanan gelombang pasang dan tsunami.

Model mina hutan Pelestarian tanaman mangrove dengan model mina hutan yaitu dibedakan menjadi 3 pola.

- a) Mangrove dikelilingi kolam
- b) Mangrove diluar kolam
- c) Mangrove diantara kolam dalam dan luar. (Suryono.2013:116).

Sistem mina hutan yang dapat diaplikasikan adalah sistem parit dan komplangan. Sistem parit adalah sistem mina hutan dimana hutan mangrove berada di tengah dan kolam berada di tepi mengelilingi hutan. Sebaliknya komplangan adalah sistem mina hutan dengan kolam di tengah dan hutan mengelilingi kolam (Suryono.2013:116).

Teknik Penanaman dengan benih Pada lokasi penanaman berlumpur lembek atau dalam, sekitar sepertiga dari panjang buah/benih (terutama bakau dan tumu) ditancapkan ke dalam lumpur secara tegak dengan bakal kecambah menghadap ke atas. Pada lokasi penanaman berlumpur agak keras, terlebih dibuat lubang baru buah/benih dimasukkan kedalam secara tegak. Pemasangan ajir sebagai tanda adanya tanaman baru, juga melindungi buah agar tidak hanyut terbawa ombak/air laut. Setelah buah ditanam, terutama di daerah terbuka, sebaiknya diberi penutup dengan pakispakistan, piyai, daun nipah, ranting atau lainnya (Suryono.2013:117).

Penanaman dengan bibit dengan membuat lubang terlebih dahulu. Kantong plastik, polibeg, botol air mineral bekas sebagai media pembibitan, bibit dimasukkan kedalam lubang media tersebut secara tegak sebatas leher

akar dan ditutupi dengan lumpur. Bibit diikat dengan ajir agar bibit tidak hanyut (Suryono.2013:117).

2. Pembuatan dinding pemecah ombak

Bangunan ini berfungsi untuk melindungi pantai yang terletak dibelakangnya dari serangan gelombang yang dapat mengakibatkan erosi pada pantai. Perlindungan oleh pemecahan gelombang lepas pantai terjadi karena berkurangnya energi gelombang yang sampai di perairan di belakang bangunan. Karena pemecah gelombang ini dibuat terpisah ke arah lepas pantai, tetapi masih di dalam zona gelombang pecah (*breaking zone*). Maka bagian sisi luar pemecah gelombang memberikan perlindungan dengan meredam energi gelombang sehingga gelombang dan arus di belakangnya dapat dikurangi. Senada dengan penjelasan di atas, salah seorang informan memberikan penjelasan bahwa:

“pembangunan penahan gelombang atau dinding pemecah ombak sangat membantu dalam pencegahan terjadinya abrasi pantai, dimana bangunan dinding pemecah gelombang dapat menahan hantaman gelombang langsung, dengan demikian berkurangnya energi gelombang di daerah terlindung akan mengurangi pengiriman sedimen di daerah tersebut”. (Wawancara dengan RM 24 februari 2017)

Gelombang yang menjalar mengenai suatu bangunan peredam gelombang sebagian energinya akan dipantulkan (refleksi), sebagian diteruskan (transmisi) dan sebagian dihancurkan (dissipasi) melalui pecahnya gelombang, kekentalan fluida, gesekan dasar dan lain-lainnya. Pembagian besarnya energi gelombang yang dipantulkan, dihancurkan dan diteruskan tergantung karakteristik gelombang datang (periode, tinggi, kedalaman air), tipe bangunan peredam gelombang (permukaan halus dan

kasar, lulus air dan tidak lulus air) dan geometrik bangunan peredam (kemiringan, elevasi, dan puncak bangunan). Berkurangnya energi gelombang di daerah terlindung akan mengurangi pengiriman sedimen di daerah tersebut. Maka pengiriman sedimen sepanjang pantai yang berasal dari daerah di sekitarnya akan diendapkan dibelakang bangunan. Pantai di belakang struktur akan stabil dengan terbentuknya endapan sediment tersebut. Terkait penjelasan informan mengenai pembangunan dinding pemecah gelombang, Kepala BKBD juga menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya breakwater atau pemecah gelombang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemecah gelombang sambung pantai dan lepas pantai. Tipe pertama banyak digunakan pada perlindungan perairan pelabuhan, sedangkan tipe kedua untuk perlindungan pantai terhadap erosi. Secara umum kondisi perencanaan kedua tipe adalah sama, hanya pada tipe pertama perlu ditinjau karakteristik gelombang di beberapa lokasi di sepanjang pemecah gelombang, seperti halnya pada perencanaan groin dan jetty. Penjelasan lebih rinci mengenai pemecah gelombang sambung pantai lebih cenderung berkaitan dengan palabuhan dan bukan dengan perlindungan pantai terhadap erosi. Selanjutnya dalam tinjauan lebih difokuskan pada pemecah gelombang lepas pantai.” (Wawancara dengan IC 24 februari 2017)

Breakwater atau dalam hal ini pemecah gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan pantai terhadap erosi dengan menghancurkan energi gelombang sebelum sampai ke pantai, sehingga terjadi endapan dibelakang bangunan. Endapan ini dapat menghalangi transport sedimen sepanjang pantai.

Seperti disebutkan diatas bahwa pemecah gelombang lepas pantai dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai, maka

tergantung pada panjang pantai yang dilindungi, pemecah gelombang lepas pantai dapat dibuat dari satu pemecah gelombang atau suatu seri bangunan yang terdiri dari beberapa ruas pemecah gelombang yang dipisahkan oleh celah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka upaya pemerintah Kabupaten Takalar dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai di Desa Bontomarannu dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar adalah melakukan kegiatan pembangunan penahan atau turap dan pemecah gelombang di beberapa titik yang terlalu parah terkena abrasi seperti di Desa Bontomarannu yang memiliki kawasan pesisir. Selain itu upaya rehabilitasi secara alami juga berhasil dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat peduli lingkungan pesisir untuk ikut serta melakukan kegiatan mulai dari persemaian, pembibitan, dan penanaman di beberapa titik lokasi rehabilitasi kawasan mangrove. Lemahnya koordinasi pada lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir membuat pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Takalar tidak berjalan dengan lancar, hingga sampai saat ini pun upaya meningkatkan koordinasi antar sektor juga belum bisa dicapai. Selain itu juga belum ada bentuk kongkrit dari pemerintah untuk membuat Perangkat Hukum seperti Peraturan Daerah yang mengatur upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai Desa Bontomarannu Kabupaten Takalar.

2. Faktor Yang paling Berpengaruh Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar yaitu diadakannya penopang di pesisir pantai seperti pohon mangrove, dan pembuatan dinding pemecah ombak. Serta peran serta masyarakat dalam melestarikan pohon mangrove.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Takalar lebih menguatkan koordinasi antar sektor/lembaga/instansi yang memiliki peran yang sama dalam melakukan kegiatan penanggulangan abrasi baik secara alami atau rehabilitasi maupun secara buatan seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini bertujuan agar terciptanya pelaksanaan program yang terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pelaksanaan kegiatan.
2. Pemerintah Kabupaten Takalar harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai. Hal ini agar lembaga terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum memiliki pedoman dan aturan jelas yang jelas dan lebih fokus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia . Departemen Komunikasi dan Informatika RI : Jakarta
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. Penanggulangan Bencana
- Emerson, H. 1995. *Sistem Birokrasi Pemerintah*. CV Mas Agung: Jakarta
- Ghufron. H. Kordi K.M. 2012. *Ekosistem Mangrove (Potensi, fungsi, dan pengelolaan)*. PT. Rineka Cipta,,: Jakarta
- Hasibuan, Malayu. 1995. *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. Bumi Aksara: Jakarta
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta : Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Koesnadi Hardjasoemantri,2015. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Matthew M. Linham. 2010. *Technologies for Climate Change Adaptation, coastal erosion and Flooding: USA*
- Nurjanna, Dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Alfabeta: Bandung
- Opa, Esry T. 2011.*Perubahan Garis Pantai Desa Bentengan Kecamatan Pusomen, Minahasa Tenggara*. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis Vol. VII-3.Manado.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
109
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Ramli, Soehetman. 2010. *Manajemen Bencana*. Dian Rakyat: Jakarta
- Rasyid, Harun. 2011. *Peran dan Fungsi Pemerintahan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Safiie, Kencana Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju : Bandung
- Salam, Dharma Setywan . 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Penerbit Djambatan: Jakarta
- Siagian, Sondang. 2001. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung: Jakarta
- Suryono, Ahmad. 2013. *Sukses Usaha Pembibitan Mangrove Sang Penyelamat Pulau*. Pustaka Press: Yogyakarta
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali: Jakarta
- Soegiarto, A. 1976. *Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Lembaga Oseanologi Nasional: Jakarta.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. R&D. Alfaeta: Bandung
- Thota, Miftah. 1995. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia

Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia

Warisno, dan Kres Dahama. 2013. *Budidaya hutan mangrove*. PT Agro Media Pustaka: Jakarta Selatan

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta

[Http://armeidi.blogspot.co.id/2013/03/abrasi-pantai.html](http://armeidi.blogspot.co.id/2013/03/abrasi-pantai.html)

[Http://fenoalam.blogspot.co.id/2013/08/penyebab-dan-cara-mengatasi-abrasi.html](http://fenoalam.blogspot.co.id/2013/08/penyebab-dan-cara-mengatasi-abrasi.html)

[Http://id.wikipedia.org/wiki/pengelolaan_lingkungan_hidup_di_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/pengelolaan_lingkungan_hidup_di_Indonesia)

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir](http://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir)

[Http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/abrasi-pantai](http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/abrasi-pantai)

[Http://materi-perkapalan.blogspot.com/2013/07/sedikit-tentang-abrasi.html](http://materi-perkapalan.blogspot.com/2013/07/sedikit-tentang-abrasi.html)

[Http://www.berpendidikan.com/2015/06/pengertian-kerja-sama-dan-bentuknya-beserta-contohnya.html](http://www.berpendidikan.com/2015/06/pengertian-kerja-sama-dan-bentuknya-beserta-contohnya.html)

[Http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-bentuk-bentuk-kerja-sama-cooperation.html](http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-bentuk-bentuk-kerja-sama-cooperation.html)

[Http://zafiraafriza.blogspot.co.id/2013/06/karakteristik-masyarakat-pesisir-di.html](http://zafiraafriza.blogspot.co.id/2013/06/karakteristik-masyarakat-pesisir-di.html)

[Http://82junior.blogspot.co.id/2011/02/penyebab-terjadinya-abrasi.html](http://82junior.blogspot.co.id/2011/02/penyebab-terjadinya-abrasi.html)